

FAKTA Minta Walikota Selidiki Audit BPK

PONTIANAK. Koordinator FAKTA Kalbar, Lim Kheng Sia meminta Walikota Pontianak menyelidiki lebih jeli terkait hasil audit BPK Kalbar, atas temuan dugaan kebocoran pajak yang dikelola Dispenda.

"Walikota jangan hanya menginginkan penilaian yang baik dari kinerja SOPD-nya, khususnya Dispenda. Ini audit BPK. Jika kita salah, berarti BPK juga salah. Harusnya Walikota juga melihatnya. Ini benar dan bukan mengadagadagada. Jika pun Walikota menilai bahwa ini kesalahan dari wajib pajak, harusnya hal itu diselidiki," tegas Lim, Jumat (21/1).

Lim mengaku adanya kemajuan pembangunan setelah Kota Pontianak dipimpin Sutarmidji. "Namun tidak semuanya baik. Ada beberapa sektor yang belum diperhatikan. Salah satunya pendapatan daerah," ungkapnya.

Menurutnya, diduga ada beberapa modus penyimpanan dalam pemungutan pajak dan penerimaan pajak daerah Pontianak. Diantaranya kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah dan surat setoran pajak daerah.

"Sehingga merugikan penerimaan daerah sebesar Rp155.580.935. Hanya dengan 10 wajib pajak sebagai contoh pengujian BPK, ditemukan kebocoran pajak pada Dispenda sebesar Rp379.077.364. Mengapa demikian? Kasus kebo-

coran pajak daerah terjadi, bisa saja karena ada kongkalikong antara pengusaha dan aparat pemungut pajak," tuding Lim.

Dikatakan Lim, para pengusaha akan lebih nyaman menyetor biaya pajak ke kantong pribadi aparat pemungut pajak, daripada ke kas daerah. Jika pengusaha jujur menyetor pajak ke kas daerah, memakan biaya yang besar. "Jika menyetor ke kantong pribadi, maka akan ada negoisasi. Pengusaha tidak ada mengeluarkan biaya yang besar," tuding Lim seraya mengatakan, pihaknya hanya melihat hasil audit BPK. "Kalau BPK salah, berarti kami juga salah," ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Pontianak H Sutarmidji SH MHum mengatakan, kalau memang ada kebocoran dan pejabat di lingkungan Pemkot melakukan negosiasi, silakan melaporkan informasi tersebut. Sebab, selama ini wajib pajak yang melakukan penghitungan potensi pajaknya, sementara pemerintah hanya melakukan pengawasan saja.

Sutarmidji menyangkan adanya pihak yang belum bisa membedakan penggelapan dengan kebocoran pajak. Meski sudah ditunjukkan hasil audit BPK semester satu, di mana ada selisih audit BPK sebesar Rp233.496.429,37 dari omzet 10 wajib pajak.

"Itu hanya asumsi saja. Mungkin yang diaudit BPK memang segitu harusnya dikeluarkan oleh wajib pajak. Namun wajib pajak

yang menggelapkan pendapatannya mereka yang seharusnya diserahkan kepada Dispenda. Jadi bukan kebocoran, tapi penggelapan," jelas Midji sapaan akrabnya.

Kepala Dispenda Kota Pontianak juga membantah tuduhan FAKTA terkait adanya kebocoran pada penerimaan daerah sektor pajak di Kota Pontianak. Khususnya dalam penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2010.

"Itu bukan kebocoran tetapi, hanya potensi pajak daerah yang belum tergarap atau terealisasi. Apalagi data yang diambil oleh LSM tersebut merupakan data uji petik tahun 2009 lalu yang hanya diambil contohnya saja oleh BPK," ungkap Rudi Enggano Kenang, Kepala Dispenda Kota Pontianak. (oen)